

Korupsi kepala daerah dan pertumbuhan industri: Studi dari Kabupaten dan Kota Mojokerto

Sanda Aditiya Arsandi

Universitas Gadjah Mada. Bulaksumur Yogyakarta 55281, Indonesia

sanda.aditiya@mail.ugm.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Ada perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai dampak korupsi terhadap pertumbuhan industri. Banyak orang percaya bahwa korupsi akan menghambat pertumbuhan industri, tetapi beberapa penelitian (terutama di Asia) menemukan bahwa korupsi adalah pelumas untuk roda bisnis. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji hubungan antara pertumbuhan industri dan korupsi dengan menggunakan metode studi kasus dan teknik *quantitative content analysis* pada kondisi di Kabupaten dan Kota Mojokerto, dua wilayah yang industrinya merupakan sektor pembangunan yang penting. Setidaknya, dalam empat periode terakhir, mantan Bupati dan Walikota Mojokerto diberitakan terlibat kasus korupsi. Padahal, di kedua wilayah tersebut, industri merupakan sektor pembangunan yang penting. Kami menguji hubungan antara korupsi yang terjadi di Kabupaten dan Kota Mojokerto terhadap pertumbuhan industri menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan menggunakan analisis kuantitatif pada beberapa parameter pertumbuhan industri (seperti jumlah tenaga kerja, nilai investasi, jumlah perusahaan, dan jumlah produksi), kami menemukan bahwa kepala daerah yang terlibat dalam beberapa kasus korupsi baik di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, tidak bisa membawa perubahan positif dalam pertumbuhan industri selama masa jabatannya. Sebaliknya menimbulkan beberapa penurunan di kedua daerah.

Kata Kunci: Studi Kasus; Mojokerto; Korupsi; Pertumbuhan Industri

How to Cite: Arsandi, S. A. (2022). Regional head corruption and industrial growth: Evidence from Mojokerto Regency and City. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 103–112. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.857>



Pendahuluan

Peninggalan fisik kerajaan terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara tersebar di berbagai wilayah di Mojokerto. Sejarah mencatat sebagian tempat di Mojokerto merupakan ibu kota Kerajaan Majapahit yang makmur dengan pemimpin yang cakap. Dirangkum dalam cerita-cerita Panji, para raja menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan, penghormatan terhadap kemanusiaan, etika sosial yang santun dan setara, serta diplomasi (Munandar, 2020) untuk konsolidasi kekuasaan (Kieven, 2013). Pada tahun 1300-an, Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya dengan menyatukan hampir seluruh nusantara, termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Filipina. Namun akhir-akhir ini, kegemilangan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada tampaknya tidak menjadi teladan bagi para pemimpin daerah di sana. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, kata "Mojokerto" identik dengan pemberitaan korupsi kepala daerah di media massa (surat kabar cetak dan online). Setidaknya dalam empat periode terakhir, mantan kepala daerah di Mojokerto diberitakan terlibat dalam kasus korupsi, tidak termasuk kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau anggota DPRD. Maraknya kasus korupsi secara perlahan-lahan dapat menggeser citra daerah ini.

Sementara itu, baik di situs resmi Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Pemerintah Kota Mojokerto, 2013) maupun Pemerintah Kota Mojokerto (Pemerintah Kota Mojokerto, 2017), industri merupakan sektor andalan kedua daerah. Industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi untuk mengubah barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan menjadi barang jadi/setengah jadi, dan/atau barang yang kurang berharga menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang mendekati pengguna akhir (Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2016). Kota Mojokerto memiliki berbagai industri pengolahan seperti perak, rokok, konveksi, makanan, dan minuman. Sementara itu, Kabupaten Mojokerto merupakan rumah bagi berbagai industri seperti

logam dasar, pupuk, tekstil, dan industri pengolahan lainnya. Kabupaten Mojokerto bahkan secara intensif mengembangkan Kawasan Industri di berbagai kecamatan seperti Ngoro (500 hektar), Mojoanyar (500 hektar), dan kombinasi 10.000 hektar di Jetis, Kemlagi, dan Dawarblandong (Pemerintah Kota Mojokerto, 2013). Sekilas, upaya pengembangan industri ini terlihat kontras dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Indonesia memasuki era di mana mereka yang terpilih untuk jabatan publik didominasi oleh para pebisnis. Akar korupsi politik di Indonesia adalah percampuran politik dan bisnis, yang menciptakan peluang terjadinya berbagai konflik kepentingan (Syarif & Faisal, 2019).

Perilaku pejabat daerah di Kabupaten dan Kota Mojokerto identik dengan korupsi politik. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan untuk keuntungan pribadi (Kramer, 1998). Pengaruh korupsi terhadap industri manufaktur di Indonesia telah dipelajari oleh Vial dan Hanoteau dengan menggunakan data panel pada era Suharto (1975-1995) yang menunjukkan bahwa praktik suap tidak terbukti secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan industri (Vial & Hanoteau, 2010). Korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jika berada di atas ambang batas korupsi dan sebaliknya jika berada di bawah ambang batas korupsi (Alfada, 2019). Namun, dalam penelitian lain, praktik korupsi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan industri (Fisman, R., & Svensson, 2007; McArthur & Teal, 2002). Beberapa penelitian (terutama di Asia) bahkan menemukan bahwa korupsi adalah “pelumas” yang melumasi roda bisnis (Nawatmi, 2016; Wei, 1999).

Berangkat dari perbedaan literatur tersebut, kami melakukan penelitian terkait perilaku korupsi kepala daerah yang terjadi di Indonesia pasca Orde Baru dan menyelidiki pengaruh perilaku tersebut terhadap pertumbuhan industri. Kabupaten dan Kota Mojokerto dipilih karena di dua daerah tersebut para kepala daerah terbukti terlibat kasus korupsi setidaknya dalam empat periode terakhir sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Kasus Korupsi Kepala Daerah di Mojokerto

Daerah	Nama	Periode	Kasus
Kota Mojokerto	TGS	1994-2003 (2 periode)	korupsi dana program pemekaran kecamatan di Kota Mojokerto
	AGS	2003-2013 (2 periode)	dugaan korupsi pengalihan status aset tanah kas desa (Ishomuddin, 2014)
	MSY	2013-2018	terlibat kasus suap pembahasan perubahan APBD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017
Kabupaten Mojokerto	ACH	2000-2008 (2 periode)	korupsi dana kas daerah senilai Rp 30,9 miliar
	SWD	2008-2010	terbukti melakukan korupsi sendiri dengan meminta pencairan dana tanpa Surat Perintah Pembayaran selain menerima arus kas dari ACH
	MKP	2010-2018 (2 periode)	terlibat dalam suap terkait perolehan izin pemanfaatan ruang dan izin pembangunan beberapa menara telekomunikasi

Sumber: disarikan dari berbagai media nasional

Korupsi memakan korban yang signifikan pada perekonomian mana pun. Bank Dunia (2001) menyatakan bahwa korupsi merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, aktivitas investasi, perdagangan internasional dan stabilitas harga (Dreher & Herzfeld, 2005). Dreher dan Herzfeld (2005) menyebutkan bahwa PDB Indonesia setiap tahun menurun rata-rata 0,19% karena korupsi, sementara PDB per kapita menurun rata-rata US \$599 setiap tahun. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kemudahan Berusaha (IKB) dalam lima tahun terakhir memiliki kecenderungan yang sama: semakin tinggi IPK, semakin tinggi IKB (Pusparisa, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa di Indonesia, iklim bisnis berhubungan langsung dengan tingkat korupsi.

Sayangnya, korupsi di Indonesia marak terjadi di kalangan pejabat pemerintah, perwakilan rakyat, dan masyarakat luas (Badan Pusat Statistik, 2019). Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dilakukan Badan Pusat Statistik tahun 2012-2020 menunjukkan IPAK cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, skor IPAK berada di 3,84, sementara pemerintah telah menargetkan 4,00 (Badan Pusat Statistik, 2020). Beberapa kesimpulan yang perlu diperhati-

kan dalam survei ini adalah: (1) Dalam survei IPAK 2019, responden berusia muda (<40 tahun) lebih permisif terhadap perilaku korupsi, meskipun hasil ini berbanding terbalik dengan hasil survei IPAK 2020; (2) Dalam survei IPAK 2019 juga disebutkan bahwa masyarakat semakin permisif terhadap korupsi di lingkungan keluarga; dan (3) Dalam survei IPAK 2020 ditemukan masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang membayar lebih dari ketentuan saat mengakses pelayanan publik.



Gambar 1. Perbandingan dari IPK dan IKB di Indonesia sumber: www.transparency.org dan data.worldbank.org

Semakin banyak publik yang melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus korupsi adalah sebuah pencapaian yang sulit. Hal ini menunjukkan sisi tragis dari mentalitas korupsi (Santoso et al., 2014). Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membandingkan bagaimana korupsi kepala daerah dapat mempengaruhi industri. Data yang akan digunakan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota Mojokerto yang tersedia melalui laman resminya.

Metode

Ini adalah penelitian studi kasus. Kami menggunakan studi kasus karena beberapa alasan: Pertama, ada fenomena korupsi khas yang terjadi secara berurutan dari masa jabatan ke masa jabatan (seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1) di Mojokerto. Padahal Mojokerto merupakan daerah yang berorientasi pada pengembangan industri. Kedua, masalah ini tidak bisa kita telusuri dengan pendekatan lain karena keterbatasan akses terhadap data dan sumber yang sensitif terkait dampak korupsi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif. Analisis isi digunakan untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks atau sumber lain yang bermakna, memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena korupsi ini (Krippendorff, 1991).

Kami menjalankan sampling teoritis untuk memilih objek penelitian dalam studi kasus ini. Kami menggunakan parameter pertumbuhan industri pada periode kepala daerah yang terlibat korupsi selama beberapa periode terakhir di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota Mojokerto. Untuk Kabupaten Mojokerto, data *output* industri didasarkan pada tahun 2012, 2013 dan 2019 sesuai dengan data yang ada. Sedangkan untuk Kota Mojokerto analisis didasarkan pada tahun 2014 dan 2016 sesuai ketersediaan data.

Kami menggunakan analisis isi kuantitatif untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan industri, yang diwujudkan dalam beberapa parameter. Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah perhitungan setiap variabel untuk mendapatkan nilai *output* industri, yaitu dengan mengurangi *output* industri tahun terakhir dengan tahun awal, yang kemudian dibagi dengan *output* tahun awal dan dikalikan 100% sebagaimana Persamaan 1.

$$\text{Pertumbuhan Industri (y)} = \frac{(\text{output industri tahun ke-2} - \text{output industri tahun ke-1})}{\text{output industri tahun ke-1}} \times 100\% \dots\dots (1)$$

Untuk Kabupaten Mojokerto, pengklasifikasian hasil industri didasarkan pada jenis barang yang dihasilkan oleh industri tersebut, dengan tahun 2012 sebagai tahun awal dan 2019 sebagai tahun terakhir. Sedangkan untuk Kota Mojokerto, klasifikasi hasil industri didasarkan pada jenis industrinya, dengan tahun 2014 sebagai tahun awal dan tahun 2016 sebagai tahun terakhir. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan membandingkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahun dimana analisis tersebut dilakukan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang merupakan komponen penyusun *output* industri (pada Persamaan 1), antara lain jumlah perusahaan (x_1), jumlah tenaga kerja yang terlibat (x_2), nilai produksi (x_3) dan nilai investasi (x_4).

Untuk Kota Mojokerto variabel yang digunakan adalah x_1 , x_2 , x_3 dan x_4 (Persamaan 2), sedangkan untuk Kabupaten Mojokerto digunakan variabel x_1 dan x_2 (Persamaan 3). Persamaan yang dihasilkan untuk Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

$$\text{Output Industri} = \frac{(\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 + \Delta x_4)}{4} \text{ di mana } \Delta = \frac{\text{variabel } x \text{ tahun ke-2} - \text{variabel } x \text{ tahun ke-1}}{\text{variabel } x \text{ tahun ke-1}} \dots (2)$$

Persamaan yang dihasilkan untuk Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

$$\text{Output Industri} = \frac{(\Delta x_1 + \Delta x_2)}{2} \text{ di mana } \Delta = \frac{\text{variabel } x \text{ tahun ke-2} - \text{variabel } x \text{ tahun ke-1}}{\text{variabel } x \text{ tahun ke-1}} \dots (3)$$

Yang dimaksud dengan 'jumlah perusahaan' adalah jumlah perusahaan yang didirikan di masing-masing kabupaten dan kota di Mojokerto. 'Jumlah tenaga kerja yang terlibat' menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan di berbagai sektor industri. 'Nilai produksi' adalah jumlah rupiah yang dihasilkan dari produk yang dihasilkan industri. 'Nilai investasi' adalah jumlah rupiah yang diinvestasikan ke sektor tersebut oleh investor.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0 = y \geq 0$ (korupsi tidak memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan industri)

$H_1 = y < 0$ (korupsi memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan industri)

Hasil dan Pembahasan

Profil Daerah

Kabupaten dan Kota Mojokerto memiliki luas wilayah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah sekitar 969.360 kilometer persegi, yang hanya 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Kota Mojokerto bahkan hanya memiliki luas wilayah sekitar 16,47 kilometer persegi.

Dari segi kewilayahan, Kabupaten dan Kota Mojokerto merupakan daerah penyangga Kota Metropolitan Surabaya. Keduanya merupakan bagian dari kelompok Gerbang Kertasusila, yang mengelilingi dan memiliki pengaruh langsung terhadap Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sebagai *buffer zone*, perekonomian kedua wilayah ini relatif maju seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Sektor yang terpengaruh oleh pesatnya permintaan pasar adalah *real estate*, perdagangan dan transportasi. Surabaya dan Mojokerto terhubung langsung dengan kereta api komuter. Jalan Nasional yang menghubungkan Surabaya dan Mojokerto selalu ramai, mencerminkan mobilitas penduduk di kedua wilayah tersebut. Pada tahun 2017, jumlah penduduk dari Kabupaten Mojokerto yang kegiatan utamanya berada di luar Kabupaten dan Kota Mojokerto hampir 93 ribu orang, sedangkan penduduk yang berasal dari luar Kabupaten dan Kota Mojokerto yang kegiatan utamanya berada di dalam kedua wilayah tersebut sebanyak 62 ribu orang. Jumlah penduduk di Surabaya yang kegiatan utamanya berada di luar kota Surabaya sebanyak 62 ribu orang, sedangkan penduduk yang berasal dari luar Surabaya yang kegiatan utamanya berada di dalam kota Surabaya sebanyak 173 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2017).

Secara administratif, Kabupaten Mojokerto memiliki 18 Kecamatan, 299 Desa dan lima Kecamatan (Pemerintah Kota Mojokerto, 2013), sedangkan Kota Mojokerto memiliki tiga Kecamatan dan 18 Kelurahan (Pemerintah Kota Mojokerto, 2020). Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan di utara, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan di timur, Kota Batu dan Kota Malang di selatan, serta Kabupaten Jombang di barat. Kota Mojokerto sendiri terletak di pusat Kabupaten Mojokerto.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2020 kedua daerah ini menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Lebih dari seperlima kebutuhan belanja daerah berasal dari kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Meski mayoritas masih ditopang oleh Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), kedua daerah ini mampu menghasilkan porsi pendapatan daerah yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan sektor industri, perdagangan dan jasa di kedua wilayah tersebut relatif berkembang. Kabupaten Mojokerto memiliki PAD sebesar Rp542.338.009.277,48. Jumlah tersebut termasuk 21,5% dari total anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 2.507.879.900.336,48 (Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018-2038, 2019). Sedangkan Kota Mojokerto memiliki PAD sebesar Rp 205.935.512.000,00. Jumlah tersebut setara dengan 23,2% dari total anggaran pendapatan daerah sebesar Rp885.815.848.000,00 (Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 2019).

Deskripsi Kasus Korupsi Kepala Daerah

Walikota Mojokerto periode 1994-2003 (dua periode) TGS, divonis pada tahun 2008 oleh Pengadilan Negeri Mojokerto karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana APBD sebesar Rp 2,2 miliar. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk program pemekaran kecamatan di Kota Mojokerto. TGS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya tetapi hukumannya tidak dibatalkan. Kemudian TGS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun putusan kasasi tetap dengan 1,5 tahun penjara sesuai salinan putusan Mahkamah Agung No. 520 K/Pidsus/2009 tg/30 Desember 2011. TGS tidak dipenjarakan karena menderita penyakit Parkinson. Kasus ini juga melibatkan mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Bagian Keuangannya (Chariris, 2019).

Pada Pilkada 2013, MSY terpilih sebagai Walikota Mojokerto. MSY dan bawahannya, Kepala Dinas PUPR, tertangkap tangan KPK menyuap tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto dalam kasus suap pembahasan APBD revisi 2017. Kepala Dinas PUPR divonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 250 juta pada 10 November 2017. Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto yang menerima suap dari MSY divonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta. MSY sendiri divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta dari Pengadilan Tipikor Surabaya pada 4 Oktober 2018. Hak politiknya juga dicabut selama 3 tahun (Budianto, 2020).

Selanjutnya kita beralih ke kasus korupsi kepala daerah Kabupaten Mojokerto. ACH, bupati periode 2000-2008, divonis Pengadilan Tipikor Surabaya sembilan tahun penjara setelah terbukti melakukan korupsi dana kas daerah sebesar Rp30,9 miliar. Pada 2008, ACH mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur tetapi tidak terpilih. Korupsi juga melibatkan wakil bupati, SWD, yang selanjutnya menggantikan ACH karena mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur Jawa Timur (Chariris, 2020).

SWD, bupati periode 2008-2010 terbukti menerima kucuran dana sebesar Rp 5,3 miliar dari ACH. SWD juga terbukti melakukan korupsi sendiri dengan meminta pencairan dana tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) (Wibowo, 2012).

Pengganti SWD adalah MKP yang terpilih sebagai Bupati Mojokerto dalam dua kali pemilihan (2010 dan 2015). Belum selesai masa jabatan keduanya, pada 2018 ia ditangkap KPK sebagai tersangka kasus suap Rp2,3 miliar. Suap itu terkait pengurusan izin pemanfaatan ruang dan izin pembangunan beberapa menara telekomunikasi di Mojokerto. MKP juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah proyek. Besaran gratifikasi yang diterima mencapai Rp. 34 miliar yang sebagian besar dicuci oleh kerabat (Rahma, 2020). Menariknya, istri MKP (IFM) terpilih dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto pada 2021.

Analisis Pengaruh Korupsi terhadap Industri

Kota Mojokerto

Berdasarkan ketersediaan data yang diakses di website BPS Kota Mojokerto, dilakukan analisis perkembangan industri selama periode 2014-2016. Periode ini adalah masa jabatan walikota MSY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa variabel Kota Mojokerto mengalami pertumbuhan negatif (Tabel 2 dan Tabel 3).

Pada variabel jumlah perusahaan (x_1), pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar total 31%. Penurunan ini meliputi industri kecil, menengah dan mikro. Penurunan terbesar terjadi pada industri skala mikro dan menengah.

Pada variabel 'jumlah pekerja' yang terlibat dalam industri (x_2), terjadi penurunan besar dalam penyerapan permintaan tenaga kerja pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2014. Jumlah pekerja yang terlibat di sektor industri turun sebesar 83%. Penurunan terbesar terjadi pada industri skala menengah.

Pada variabel 'nilai produksi' (x_3), pada tahun 2016 tidak ada perubahan nilai total yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2014 (konstan). Seperti terlihat pada Tabel 2, tidak ada perubahan total yang signifikan namun terjadi pergeseran jumlah rupiah yang dihasilkan pada masing-masing klasifikasi industri. Pergeseran produksi terjadi dari sektor industri menengah ke besar. Sementara itu, produksi sektor kecil dan mikro cenderung meningkat.

Pada variabel 'nilai investasi' (x_4), nilai turun drastis pada tahun 2016, dengan total 78%. Penurunan signifikan terjadi pada sektor industri kecil dan menengah. Sementara itu, nilai investasi pada industri besar dan mikro meningkat lebih dari 400%, meskipun secara total proporsinya masih relatif kecil.

Berdasarkan keempat variabel pertumbuhan industri tersebut, terjadi pertumbuhan industri negatif di Mojokerto. Penurunan terbesar terjadi pada jumlah pekerja yang terlibat (-83%), diikuti oleh nilai investasi (-78%), dan jumlah perusahaan (-31%).

Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan laman BPS Kabupaten Mojokerto, data yang diolah meliputi jumlah perusahaan industri menengah dan besar dan jumlah pekerja menurut subsektor industri pada tahun 2012, 2013 dan 2019. Terdapat sembilan subkategori industri. Tahun 2012-2019 merupakan masa kepemimpinan Bupati Mustafa Kemal Pasha yang terjerat kasus suap terkait menara telekomunikasi dengan nilai gratifikasi Rp 34 miliar.

Tabel 4. Variabel *Output* Industri di Kabupaten Mojokerto

Klasifikasi Industri	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
	Perusahaan	Pekerja	Perusahaan	Pekerja
Industri/Tahun	2019		2012	
Makanan, Minuman, dan Tembakau	30	4.734	39	6.149
Tekstil, Pakaian, Kulit, dan Kaus Kaki	9	4.043	37	5.079
Kayu, rotan, perabot rumah tangga	14	1.134	7	1.154
Kertas, artikel kertas, percetakan dan penerbitan	7	876	18	4.024
Pupuk, Bahan Kimia, dan Karet	41	2.306	42	3.358
Semen, mineral bukan logam, minyak bumi, dan batu bara	22	747	22	6.108
Logam dasar	16	10.775	27	2.237
Alat angkut, mesin dan peralatan	8	7.041	7	400
Lainnya	7	244	24	9.376
Jumlah	154	31.900	223	37.885

sumber: <https://mojokertokab.bps.go.id/>

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan terjadi penurunan jumlah perusahaan di Kabupaten Mojokerto sebesar 31% dari tahun 2012 hingga 2019. Tiga klasifikasi industri yang mengalami penurunan terbesar adalah: industri tekstil (76%), industri pengolahan lainnya (71%) dan kertas (61%).

Dari sisi jumlah pekerja juga terjadi penurunan jumlah tenaga kerja industri besar dan menengah di Kabupaten Mojokerto, dari 37.885 orang menjadi 31.900 orang dalam kurun waktu 2012 hingga 2019. Artinya terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 16% dari tahun 2012 hingga 2019. Penurunan terbesar terjadi pada industri lainnya (-97%), semen, mineral bukan logam, minyak, dan batubara (-88%) dan kertas, artikel kertas, percetakan, dan penerbitan (-78%). Penurunan jumlah perusahaan dan tenaga kerja disarikan dalam Tabel 5.

Tabel 2. Variabel *Output* Industri Kota Mojokerto

Industrial Classification	Jumlah Perusahaan	Karyawan	Nilai Produksi (Rp Juta)	Nilai Investasi (Rp Juta)	Jumlah Perusahaan	Karyawan	Nilai Produksi (Rp Juta)	Nilai Investasi (Rp Juta)
Industry/Year			2016				2014	
Industri Skala Besar	4,00	3.267,00	1.843.250,48	213.460,82	3,00	1.007,00	205.845,16	35.978,86
Industri Skala Menengah	44,00	972,00	115.442,37	20.013,35	44,00	46.164,00	1.906.179,13	1.115.221,69
Industri Skala Kecil	570,00	5.331,00	282.631,99	23.770,73	808,00	6.663,00	180.337,49	35.122,63
Industri Skala Mikro	879,00	1.828,00	80.453,19	6.833,27	1.308,00	13.236,00	28.827,74	1.292,31
Total	1.497,00	11.398,00	2.321.778,03	264.078,17	2.163,00	67.070,00	2.321.189,52	1.187.615,49

Sumber: <https://mojokertokota.bps.go.id/>**Tabel 3.** Hasil Perubahan Variabel Industri di Kota Mojokerto

Formula	Jumlah Perusahaan (2016-2014)/2014	Karyawan	Nilai Produksi (Rp Juta)	Nilai Investasi (Rp Juta)
Industri Skala Besar	$\frac{4-3}{3} = \frac{1}{3} = 0,33 = 33\%$	$\frac{3267-1007}{1007} = \frac{-2260}{1007} = -2,24 = -224\%$	$\frac{1843250,48-205845,16}{205845,16} = \frac{1637405,32}{205845,16} = 7,95 = 795\%$	$\frac{213460,82-35978,86}{35978,86} = \frac{177481,96}{35978,86} = 4,93 = 493\%$
Industri Skala Menengah	$\frac{44-44}{44} = \frac{0}{44} = 0 = 0\%$	$\frac{972-46164}{46164} = \frac{-45192}{46164} = -0,98 = -98\%$	$\frac{115442,37-1906179,13}{1906179,13} = \frac{-1790736,76}{1906179,13} = -0,94 = -94\%$	$\frac{20013,35-1115221,69}{1115221,69} = \frac{-1095208,34}{1115221,69} = -0,98 = -98\%$
Industri Skala Kecil	$\frac{570-808}{808} = \frac{-238}{808} = -0,29 = -29\%$	$\frac{5331-6663}{6663} = \frac{-1332}{6663} = -0,2 = -20\%$	$\frac{282631,99-180337,49}{180337,49} = \frac{102294,50}{180337,49} = 0,57 = 57\%$	$\frac{23770,73 - 35122,63}{35122,63} = \frac{-11351,90}{35122,63} = -0,32 = -32\%$
Industri Skala Mikro	$\frac{879-1308}{1308} = \frac{-429}{1308} = -0,33 = -33\%$	$\frac{1828-13236}{13236} = \frac{-11408}{13236} = -0,86 = -86\%$	$\frac{80453,19-28827,74}{28827,74} = \frac{51625,45}{28827,74} = 1,79 = 179\%$	$\frac{6833,27-1292,31}{1292,31} = \frac{5540,96}{1292,31} = 4,29 = 429\%$
Total Perubahan	$\frac{1497 - 2163}{2163} = \frac{-666}{2163} = -0,31 = -31\%$	$\frac{11398-67070}{67070} = \frac{-55672}{67070} = -0,83 = -83\%$	$\frac{2321778-2321189,52}{2321189,52} = \frac{588,51}{2321189,52} = 0,00 = 0\%$	$\frac{264078,17-1187615,49}{1187615,49} = \frac{-923537,32}{1187615,49} = -0,78 = -78\%$

Sumber: diolah dari data BPS Kota Mojokerto

Tabel 5. Perubahan Per Klasifikasi Industri di Kabupaten Mojokerto

Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Pekerja
Industri/Tahun	Perubahan	
Makanan, Minuman, dan Tembakau	-23%	-23%
Tekstil, Pakaian, Kulit, dan Kaus Kaki	-76%	-20%
Kayu, rotan, perabot rumah tangga	100%	-2%
Kertas, artikel kertas, percetakan dan penerbitan	-61%	-78%
Pupuk, Bahan Kimia, dan Karet	-2%	-31%
Semen, mineral bukan logam, minyak bumi, dan batu bara	0%	-88%
Logam dasar	-41%	382%
Alat angkut, mesin dan peralatan	14%	1660%
Lainnya	-71%	-97%
Total	-31%	-16%

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Mojokerto

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pertumbuhan industri di Kota Mojokerto cenderung menurun pada periode 2014-2016. Berdasarkan empat parameter pertumbuhan industri, terjadi pertumbuhan negatif. Penurunan terjadi pada jumlah pekerja yang terlibat (83%), nilai investasi (78%) dan jumlah perusahaan (31%). Sementara itu, jumlah produk tidak mengalami peningkatan di tahun 2016. Kedua, Pertumbuhan industri di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2012 hingga 2019 mengalami penurunan sebesar 31% untuk jumlah perusahaan dan sebesar 16% untuk jumlah tenaga kerja yang terlibat.

Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pertumbuhan industri akan bernilai positif jika parameter tahun berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis kami, semua parameter pertumbuhan industri mengalami pertumbuhan negatif di bawah pimpinan kepala daerah yang terlibat korupsi. Secara kuantitatif, hasil ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah yang korup tidak dapat membawa perubahan positif dalam pertumbuhan industri selama masa jabatannya.

Keterbatasan dan Rekomendasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: Pertama, Tidak ada uji korelasi langsung antara pengaruh korupsi terhadap perkembangan industri di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Hal ini terjadi karena belum adanya publikasi yang kredibel dan relevan yang memberikan data peringkat indeks persepsi korupsi menurut kabupaten/kota. Terdapat angka IPAK yang diterbitkan oleh BPS setiap tahun, tetapi angka tersebut merupakan penjumlahan dari angka nasional. Kedua, Data pengukuran pertumbuhan industri di laman BPS Kabupaten dan Kota Mojokerto tidak lengkap sehingga antara korupsi dan dampak industri tidak dapat secara akurat diperbandingkan pada tahun dan kategori yang sama. Metode pengukuran hanya didasarkan pada perubahan beberapa variabel yang tersedia di laman BPS kedua daerah. Ketiga, Analisis penyebab terjadinya korupsi antar periode di Kabupaten dan Kota Mojokerto tidak dilakukan dalam penelitian studi kasus ini. Penting untuk melihat apakah penelitian lebih lanjut dapat mengungkapkan penyebab korupsi "diwariskan" dari satu kepala daerah ke kepala daerah lainnya. Hal ini relevan karena korupsi dapat menjadi jaringan interpersonal yang kuat karena interaksi sosial, terutama hubungan keluarga (Rahman, Baidhowi, & Agnesia, 2018). Beberapa kepala daerah di Mojokerto tercatat memiliki ikatan keluarga seperti MKP (2010-2018) dan IFM (2021-sekarang). Selain itu, patut diduga bahwa tingginya tingkat korupsi di kalangan kepala daerah di Mojokerto terjadi karena rendahnya *awareness* warga lokal terhadap korupsi di kalangan pejabat publik sebagai tindak pidana berat (Mapusari & Mahmudah, 2018).

Berdasarkan keterbatasan tersebut, ada dua rekomendasi untuk penelitian selanjutnya: (1) Melakukan uji statistik (korelasi atau regresi) untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan industri berdasarkan ketersediaan data di wilayah yang lebih luas; (2) Membuat

perbandingan variabel pertumbuhan industri yang setara dari tahun ke tahun agar lebih dapat diperbandingkan.

Daftar Pustaka

- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Komuter Gerbangkertosusila hasil survei Komuter Gerbangkertosusila 2017* (I. Luswara, T. Windiarto, & R. Savitridina (eds.)). BPS RI. <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/25/2017000000000000102368/statistik-komuter-gerbangkertosusila-hasil-survei-komuter-gerbangkertosusila-2017.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks perilaku anti korupsi 2019*. Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks perilaku anti korupsi 2020*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2020/08/31/e0720d00c6c0f130af1dca61/indeks-perilaku-anti-korupsi-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. (2016). *Perkembangan industri menurut kelompok industri*. Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. <https://mojokertokota.bps.go.id/statictable/2018/04/24/61/perkembangan-industri-menurut-kelompok-industri-2016.html>
- Budianto, E. E. (2020). *Perjalanan eks Walkot Mojokerto hingga berakhir di penjara gegara kasus suap*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5149586/perjalanan-eks-walkot-mojokerto-hingga-berakhir-di-penjara-gegara-kasus-suap>
- Chariris, M. (2019). *Mantan Wali Kota Mojokerto pikun dan alami Parkinson*. Radar Mojokerto. <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/31/01/2019/mantan-wali-kota-mojokerto-pikun-dan-alami-parkinson/>
- Chariris, M. (2020). *Achmady terlama, Mas'ud Yunus tiga kali Idul Fitri*. Radar Mojokerto. <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/29/05/2020/achmady-terlama-masud-yunus-tiga-kali-idul-fitri/>
- Dreher, A., & Herzfeld, T. (2005). The economic costs of corruption: a survey and new evidence. *SSRN Electronic Journal, January*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.734184>
- Fisman, R., & Svensson, J. (2007). Are corruption and taxation really harmful to growth? *Journal of Development Economics*, 83, 63–75.
- Ishomuddin, I. (2014). *Kejaksaaan periksa bekas Wali Kota Mojokerto* (E. Kurniawati (ed.)). Tempo.Co.
- Kieven, L. (2013). *Following the Cap-Figure in Majapahit Temple Reliefs A New Look at the Religious Function of East Javanese Temples, Fourteenth and Fifteenth Centuries* (R. Hoefte & H. S. Nordholt (eds.)). KITLV.
- Kramer, J. M. (1998). The politics of corruption. *Current History*, 97(621), 329–334.
- Krippendorff, K. (1991). *Content analysis: an introduction ot its methodology*. Sage Publications.
- McArthur, J., & Teal, F. J. (2002). *Corruption and firm performance in Africa* (No. 0409050). <https://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpdc/0409050.html>
- Mojokerto City Government. (2019). *Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 tanggal 27 Desember 2019*.
- Mojokerto Regency Government. (n.d.). *Gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Mojokerto*.
- Mojokerto Regency Government. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tanggal 27 Desember 2019*.
- Munandar, A. A. (2020). Majapahit and the contemporary kingdoms: Interactions and views. *Berkala Arkeologi*, 40(1), 1–22. <https://doi.org/10.30883/jba.v40i1.522>
- Nawatmi, S. (2016). Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara -

- Negara Asia Pasifik. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 31(1), 14–25.
- Pemerintah Kota Mojokerto. (2017). *Industri dan kerajinan*. Mojokertokota.Go.Id.
<https://old.mojokertokota.go.id/home/industri/dataindustri>
- Pemerintah Kota Mojokerto. (2020). *Kondisi geografis*. Mojokertokota.Go.Id.
<https://web.mojokertokota.go.id/profil/kondisi-geografis-qPBkluSanr>
- Pusparisa, Y. (2019). *Korupsi berkurang, iklim investasi membaik*. Katadata.Co.Id.
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6e0cf72/korupsi-berkurang-iklim-investasi-membaik>
- Rahma, A. (2020). *KPK Periksa Bupati Mojokerto di Kasus Dugaan Pencucian Uang*. Tempo.Co.
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(4), 173.
<https://doi.org/10.20473/mkp.V27I42014.173-183>
- Syarif, L. M., & Faisal, F. (2019). Addressing the root of political corruption in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 191–198.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.487>
- Vial, V., & Hanoteau, J. (2010). Corruption, manufacturing plant growth, and the Asian Paradox: Indonesian evidence. *World Development*, 38(5), 693–705.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.022>
- Wei, S.-J. (1999). Corruption in Economic, Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle? In *Policy Research Working Paper*.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=604923
- Wibowo, K. S. (2012). *Bekas Bupati Mojokerto divonis 9 tahun* (A. Supriyanto (ed.)). Tempo.Co.
<https://nasional.tempo.co/read/450742/bekas-bupati-mojokerto-divonis-9-tahun>